TERKENDALI

KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II
Nomor : 2202/SEK.PN/SK.KU1.1.1/IX/2024

TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR TINGKAT SATUAN KERJA PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II TAHUN ANGGARAN 2025

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG (097577 DAN 099075)

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II

Menimbang :

a. Bahwa memperhatikan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47/SEK/SK.KU.1.1.1/XII/2024 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya Tahun Anggaran 2025;

b. Bahwa agar Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2025 dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, dan bertanggungjawab, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun Anggaran 2025;

c. Bahwa Pejabat yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga;

e. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;

f. Peraturan Persiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

g. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

h. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

j. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210/KMA/SK/VII/2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, dan ADMINISTRASI PENGGUNA APLIKASI SISTEM SAKTI PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II.

KEDUA : Menunjuk dan Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal **01 Januari 2025** dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan : Rangkasbitung
Pada Tanggal : 31 Desember 2024

SEKRETARIS

H. BAYU FITRIAS LUHUNG BHASKARA, S.T., M.H.

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
1. Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
2. KPPN Rangkasbitung.
3. Yang bersangkutan

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

DAFTAR PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM SAKTI
TINGKAT SATUAN KERJA PADA
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG (097577 dan 099075)
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA / NIP / PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	USER SAKTI	JABATAN STRUKTURAL
1.	H BAYU FITRIAS LUHUNG BHASKARA, S.T., M.H. NIP. 19810802 200604 1 002 Penata Tk. I (III/d)	Sekretaris	Approval	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	AGUS MULYADI, S.Sos. NIP. 19790827 200604 1 004 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Validator PPK Approver Aset	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	APUD MOCHAMAD MACHFUD, S.H.. NIP. 196703301989031002	Kepala Sub Bagian PTIP	Validator PPSPM	PPSPM
4.	ARINIE GATI SUPRIYATIN, S.E. NIP. 198101162009122003 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	Opr Aset Opr Persediaan	PPABP
5.	MACHMUD KHUSAERI, S.H. NIP. 199002162009121001 Penata Muda Tk. I (III/b)	Pranata Keuangan	Opr Bendahara Opr PPK Opr PPSPM Operator GLP	Bendahara Pengeluaran
6.	DONY AFRIZAL, A.Md. NIP. 199106182020121008 Pengatur (II/c)	Pengelola Perkara	Opr Bendahara	Bendahara Penerimaan
7.	TATANG JUNIADI	-	Admin Opr Anggaran	PPNPN

SEKRETARIS

H BAYU FITRIAS LUHUNG BHASKARA, S.T., M.H..

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.